



Buletin Parlementaria

Nomor 1116/II/VIII/2020 • Agustus 2020



DPR Bahas Kerja Sama Parlemen dengan Dubes Uzbekistan



3 Tebar Kurban,
Saling Berbagi
di Tengah Pandemi



11 Publik Diminta
Tingkatkan Kewaspadaan
Terhadap Covid-19



9 772614 339005

DPR Bahas Kerja Sama Parlemen dengan Dubes Uzbekistan

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa kedekatan hubungan antara Indonesia dengan Negara Uzbekistan sudah terjalin sangat lama, terutama menyangkut hubungan sejarah Islam. Hal tersebut tentu membuat masyarakat muslim di kedua negara ini memiliki hubungan yang sangat dekat.

“Kunjungan Duta Besar Uzbekistan ini menjadi pertemuan penting untuk meningkatkan kerja sama dan hubungan yang lebih aktif dan produktif dalam menyiapkan langkah-langkah

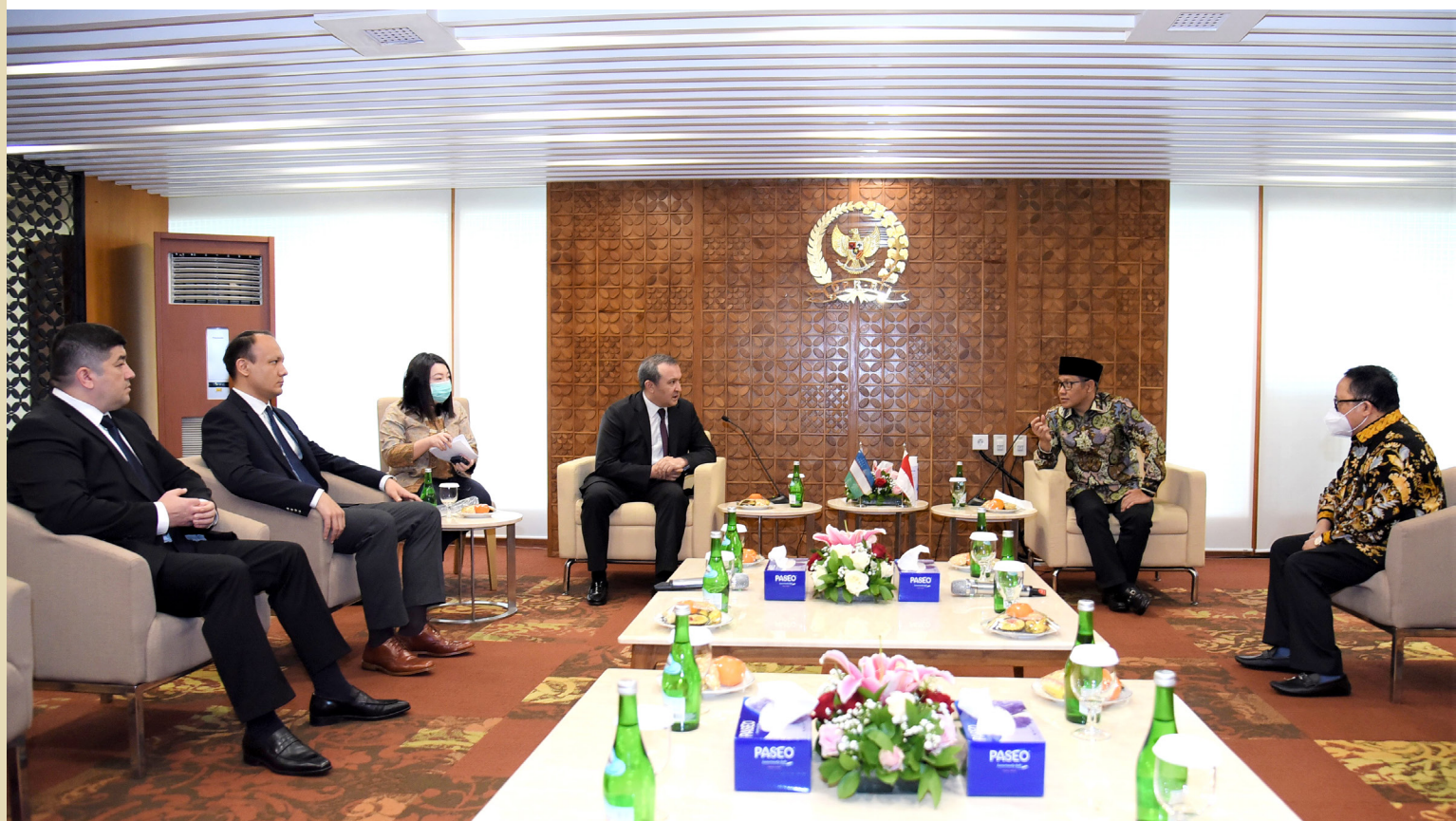
penting menyangkut hubungan kedua negara pasca pandemi Covid-19,” ucap Muhaimin saat menerima kunjungan Duta Besar Uzbekistan H.E. Mr. Ulugbek Rozukulov di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7).

Muhaimin mengatakan, selain untuk meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi antar kedua negara, tujuan kedatangan Dubes Uzbekistan tersebut adalah juga untuk meningkatkan hubungan kerja sama antar parlemen dan kerja sama di bidang pariwisata.

“Kita ingin hubungan ini menjadi lebih produktif dan efisien serta inovatif pasca pandemi Covid-19. Meskipun di masa pandemi, kita mempunyai waktu

untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan menata pola seluruh hubungan sehingga nanti setelah masa pasca pandemi sudah bisa berjalan dengan baik,” tandas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut, politisi yang akrab disapa Gus Ami itu juga memuji keindahan Negara Uzbekistan yang sudah sangat terkenal di dunia. “Banyak peristiwa sejarah yang terjadi di sana, baik di Uzbekistan sendiri maupun kawasan bekas Negara Uni Soviet lainnya. Kita mempunyai peluang yang sangat maju untuk saling bekerja sama,” pungkas Gus Ami. ■ dep/es



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menerima kunjungan Dubes Uzbekistan H.E. Mr. Ulugbek Rozukulov di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Gerald/MAN



Tebar Kurban, Saling Berbagi di Tengah Pandemi



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Kresno/MAN

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengajak masyarakat muslim yang mampu, pada hari raya Idul Adha, untuk fokus berbagi dalam melaksanakan ibadah kurban. Terlebih, dalam suasana keprihatinan akibat pandemi Covid-19 sekarang ini, berbagi daging kurban sangat membantu saudara-saudara yang terdampak pandemi Covid-19.

“Distribusi daging kurban dapat melengkapi bantuan sembako kepada mereka yang terdampak pandemi Covid-19. Tentu saja prosesi kurban hingga pembagiannya harus tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19,” kata Puan dalam siaran persnya, Jumat (31/7).

Tak lupa, kepada umat muslim yang sedang merayakan, Puan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. “Kepada umat muslim Indonesia yang saya cintai, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1441 Hijriah,” ucap Puan.

Politisi PDI-Perjuangan ini melanjutkan, berkorban juga bisa dimaknai secara luas sebagai bentuk

kerelaan untuk berbagi dan peduli dengan sesama, menciptakan solidaritas sosial dan memupuk gotong royong dalam mengatasi pandemi Covid-19.

“Kita telah melihat pengorbanan para tenaga medis yang rela mengorbankan segalanya di garda terdepan melawan virus Corona. Kita juga melihat para warga yang tidak mudik, termasuk di hari raya Idul Adha kali ini, rela mengorbankan silaturahmi fisik dengan kerabatnya demi pencegahan penularan Covid-19,” kata legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Kerelaan berkorban dan keikhlasan semua pihak untuk bahu membahu mengatasi Covid-19 dan dampaknya masih terus dibutuhkan, mengingat penularan Covid-19 masih terus terjadi.

“Dengan kerja keras dan gotong royong seluruh komponen bangsa, disertai keikhlasan dan kepatuhan seperti teladan Nabi Ibrahim ketika menerima perintah kurban, Bangsa ini segera bisa melewati masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19,” harapnya.

Di samping itu, Puan juga menunjukkan keprihatinannya kepada warga muslim Indonesia dan seluruh dunia yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia ikut merasakan kesedihan calon jemaah Haji yang tidak bisa berangkat, pasalnya kesehatan dan keselamatan harus diutamakan dan tidak boleh diabaikan.

“Kita belajar keikhlasan dan kepasrahan Nabi Ibrahim ketika menerima kehendak Allah SWT. Insya Allah tahun depan ibadah Haji bisa dilaksanakan, sehingga mereka-mereka yang tahun ini gagal melaksanakannya akan dapat berangkat. DPR RI akan terus mengingatkan Pemerintah agar ada rencana matang dan yang memberi rasa keadilan dalam keberangkatan haji tahun depan,” pungkasnya. ■ es



DPR Bahas Kerja Sama Parlemen dengan Dubes Uzbekistan

3 Tebar Kurban, Saling Berbagi di Tengah Pandemi
11 Publikasi Diminta Tingkatkan Kesepadanan Terhadap Covid-19

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapani, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Pumtho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

ANALIS MEDIA

Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natallo, Fajar Suryanto

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Sartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Pelaksanaan Kampanye Daring Masih Perlu Uji Coba



Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad. Foto: YogaMAN

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa efektivitas pelaksanaan kampanye secara daring (daring) masih perlu diujicoba, mengingat hal ini tergolong baru dan belum pernah dilakukan di Indonesia. Selain itu, faktor yang perlu untuk dijadikan pertimbangan lainnya adalah tidak setiap daerah di Indonesia yang melaksanakan pilkada mempunyai kapasitas yang sama untuk dilaksanakannya kampanye secara daring.

“Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, sebanyak mungkin kita menghindari adanya pertemuan-pertemuan, walaupun (sifatnya) terbatas, karena itu juga rentan menimbulkan klaster-klaster baru Covid-19. Namun memang keefektifitasan dalam menempuh kampanye secara daring itu memang perlu kita uji, karena memang belum pernah terjadi di Indonesia,” ucap Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8).

”

KARENA MEMANG TIDAK SEMUA LINI DI INDONESIA MEMPUNYAI KAPASITAS YANG CUKUP UNTUK KAMPANYE DARING, MISALNYA KARENA KETERBATASAN AKSES INTERNET, KUOTA, DAN LAIN-LAIN

Di satu daerah tertentu, sambung politisi Partai Gerindra itu, berdasarkan analisa yang telah dilakukan, kampanye secara daring itu tergolong efektif untuk dilaksanakan, namun bagi daerah lainnya memang harus ada satu sentuhan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih yakin bahwa calon kepala daerah yang diusung dalam Pilkada itu memang benar-benar bisa membawa aspirasi dari masyarakat.

“Karena memang tidak semua lini di Indonesia mempunyai kapasitas yang cukup untuk kampanye daring, misalnya karena keterbatasan akses internet, kuota, dan lain-lain. Untuk daerah-daerah yang termasuk zona merah yang terkendala akses internet, kami sudah mempunyai satu strategi khusus yang akan kami luncurkan pada saat pilkada dan mudah-mudahan itu efektif,” tutup Pimpinan DPR RI Korekku itu. ■ dep/es

Puan Maharani Harap Indonesia - Turki Kerja Sama Temukan Vaksin Covid-19

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani berharap kerja sama Indonesia – Turki dalam pengadaan obat dan vaksin virus Covid-19 segera terwujud. Harapan itu disampaikan Puan kepada Ketua Parlemen Turki (Grand National Assembly of Turkey) Mustafa Sentop melalui sambungan telepon.

“Saya mendengar Menteri Ristek dan Teknologi Indonesia sudah berbicara dengan Menteri Teknologi dan Industri Turki

membahas pengembangan obat dan vaksin Covid-19. Semoga kerja sama ini berhasil dan kita akan mendapatkan manfaatnya dalam waktu yang tidak lama lagi (penemuan obat dan vaksin Covid-19),” ujar Puan dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria*, Selasa (4/8).

Penanganan Covid-19 kedua negara menjadi salah satu materi pembahasan dalam *courtesy call* antara Puan dan Mustafa Sentop yang berlangsung Senin (3/8) siang waktu Jakarta.

Puan mengharapkan agar parlemen Turki ikut mendorong kerja sama tersebut agar obat dan vaksin Covid-19 segera

”

TERKAIT ISU PALESTINA YANG AKAN DISAMPAIKAN DI PBB, TENTU SAJA INDONESIA AKAN TETAP Mendukung NEGARA PALESTINA

ditemukan dan diproduksi.

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan *courtesy call* ini dalam rangka perayaan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia - Turki. “Kami saling mengucapkan selamat Idul Adha dan *ngobrol* tentang bagaimana kondisi Indonesia dan Turki, terutama di tengah situasi menghadapi pandemi Covid-19 ini,” lanjut Puan.

Selain itu, pembicaraan antara keduanya menyinggung isu Palestina. Puan menegaskan Indonesia akan mendukung penuh Palestina di forum internasional. “Terkait isu Palestina yang akan disampaikan di PBB, tentu saja Indonesia akan tetap mendukung negara Palestina,” tegas Menko PMK Periode 2014-2019 itu.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop menyatakan penghargaan tinggi atas hubungan persahabatan erat Indonesia-Turki. “Ke depan kerja sama RI-Turki harus diperkuat di berbagai bidang,” harap Mustafa Sentop kepada Puan. ■ *ann/sf*

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani.
Foto: Gerald/IMAN



RUU PDP Harus Antisipasi Perkembangan Teknologi Informasi

Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menilai pentingnya kehadiran Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk mengantisipasi perubahan dan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi (TI) dalam rangka melindungi privasi data masyarakat.

“Komisi I DPR dan Pemerintah harus benar-benar melihat Rancangan Undang-Undang ini agar dibuat untuk mengantisipasi pesatnya laju IT. Jangan sampai direvisi terus seperti yang terjadi, misalnya RUU Penyiaran yang dinilai sudah tidak layak lagi dan saat ini revisi ketiga,” kata Tamliha saat menjadi narasumber dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk “RUU Perlindungan Data Pribadi, Dapatkah Data Warga Terlindungi?” di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8).

Politisi F-PPP ini mengatakan, penyusunan RUU PDP harus benar-benar jeli melihat seperti apa arah perkembangan teknologi informasi ke depan, misalnya bagaimana cara seseorang menjebol data pribadi warga. Hal itu menurut dia, perlu diperhatikan agar jangan sampai setelah RUU tersebut disahkan menjadi UU, lalu dilakukan revisi berulang-ulang seperti yang terjadi dalam RUU Penyiaran.

“Menurut saya harus diantisipasi jangan sampai bolak-balik merevisi sebuah undang-undang, yang itu memerlukan biaya yang cukup besar, misalnya Undang-Undang Penyiaran sudah dua periode dibahas,” jelas Tamliha. Ia juga menyoroti maraknya

kasus kebocoran data pribadi yang terjadi pada lembaga penyelenggara telekomunikasi, karena awalnya meminta data secara lengkap seperti nomor induk kependudukan.

Menurut dia, semestinya dibuat dahulu aturan terkait perlindungan data, lalu Pemerintah baru memperbolehkan penyelenggara telekomunikasi meminta input data masing-masing warga. “RUU PDP ini dibuat setelah data warga bocor dahulu, misalnya ketika setiap pemilik kartu telepon genggam diwajibkan untuk mengisi data (pribadi) di kios-kios kecil,” kata Tamliha.

Terkait hal itu, lanjutnya, Komisi I DPR RI sebenarnya sudah mengkritisi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika saat itu karena data

warga bocor ke berbagai perusahaan, misalnya yang bergerak di bidang transportasi. Kendati pembahasan RUU PDP yang saat ini sedang dibahas agak terlambat, namun Tamliha menilai itu lebih baik daripada Indonesia tidak memiliki aturan terkait perlindungan data pribadi ke depannya.

Legislator dari Kalimantan Selatan I ini juga mendorong peluang kerja sama antar negara dalam menjaga data pribadi warga negara. “RUU PDP nanti harus memuat batasan-batasan yang mana data yang bisa diakses oleh mitra baik regional maupun internasional,” kata Tamliha sembari menambahkan batasan tersebut penting untuk memastikan agar Indonesia dapat berdaulat dalam hal data. ■ ann/sf



Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha (kanan) dan Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani (tengah) saat menjadi narasumber dalam diskusi Forum Legislasi. Foto: Rumi/MAN

Anggota DPR Tepis Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020

Anggota Komisi II DPR RI Guspardy Gaus menepis wacana penundaan kembali Pilkada serentak 2020 di tengah peningkatan jumlah kasus baru virus Covid-19 di Indonesia. Dikatakannya, tidak ada keraguan lagi terkait pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Penetapan jadwal Pilkada 2020 telah melalui pembahasan dan kajian yang mendalam antara pemangku kebijakan terkait dan telah diputuskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Regulasi itu telah disahkan pada 17 Juli 2020 menjadi Undang-Undang.

“Perppu tersebut dikeluarkan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak yang semula direncanakan 23 September menjadi 9 Desember 2020. Hal itu disebabkan adanya ancaman bencana non alam pandemi Covid-19,” ucap Guspardy melalui siaran persnya kepada **Parlementaria**, Selasa (4/8).

Awalnya, Komisi II DPR RI mewacanakan pelaksanaan Pilkada 2020 diundur menjadi tahun 2021, tambah Guspardy. Tetapi setelah dilakukan pembicaraan secara intensif serta berdasarkan analisa dan kajian-kajian antara pemerintah dan DPR, maka ditetapkanlah penundaan Pilkada itu menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengemukakan, perubahan jadwal hanya dimungkinkan bila terjadi kondisi yang luar biasa. “Kemungkinan untuk diundur lagi ke 2021 sangat kecil, kecuali memang ada sesuatu keadaan yang sangat luar biasa terjadi,” ujar politisi dapil Sumatera Barat II itu.



Anggota Komisi II DPR RI Guspardy Gaus. Foto: Runi/MAN

Ia menyatakan, jika terjadi sesuatu hal yang luar biasa sehingga mengharuskan Pilkada diundur, maka tentu akan dilakukan lagi pembicaraan antara pemerintah dengan DPR. Guspardy juga menyebutkan, pertimbangan lain terkait penetapan tanggal Pilkada serentak 2020 itu adalah tidak ada yang bisa menjamin kapan wabah Covid-19 akan berakhir.

Terkait anggaran Pilkada yang saat ini telah dialihkan Pemerintah untuk penanganan Covid-19, Guspardy berujar, publik tak perlu risau. Peralihannya, Mendagri Tito Karnavian sudah membuat surat edaran melarang seluruh kepala daerah mengalihkan

anggaran Pilkada sebagai dana penanganan wabah. “Malah Komisi II telah menyetujui usulan tambahan pelaksanaan anggaran Pilkada serentak yang bersumber dari APBN,” katanya.

Guspardy meminta KPU agar berkomitmen memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan hingga puncak Pilkada. “Salah satu syarat tahapan Pilkada 2020 dapat dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19 adalah wajib menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya. Sebagai informasi, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. ■ dep/es

Polisi Diminta Tidak Tebang Pilih Tangani Kasus Intoleransi

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy berharap polisi tidak tebang pilih dalam menangani kasus tindakan intoleransi, dan ujaran kebencian yang ada dalam masyarakat. Baik yang dilakukan dalam sebuah aksi unjuk rasa, maupun melalui media sosial.

“Aparat harus bertindak sigap dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus. Aksi pembakaran foto Habib Rizieq baru-baru ini adalah tindakan yang tidak dapat ditolerir. Hal itu seharusnya tidak boleh dilakukan dalam sebuah aksi unjuk rasa. Tindakan tersebut termasuk perbuatan menyatakan permusuhan dan kebencian. Seharusnya aparat memproses mereka dengan pasal 156 KUHP,” ujar Aboe dalam siaran persnya kepada **Parlementaria**, baru-baru ini.

”

APARAT HARUS BERTINDAK SIGAP DAN TIDAK TEBANG PILIH DALAM MENANGANI KASUS

Seharusnya, lanjut Aboe, aparat bertindak sigap dengan kondisi saat ini, jangan sampai polisi terlihat cekatan ketika menerima laporan dari satu pihak. Namun jika ada laporan dari pihak lain terlihat kurang sigap atau *slow respons*. Sebut saja ketika kasus Ahmad Dani lalu, laporan soal tindakan ujaran kebencian bisa diproses dengan cepat. Sejatinya, hal yang sama

juga bisa dilakukan aparat dalam kasus pembakaran foto Habib Rizieq ini.

“Harus diingat bahwa setiap tindakan yang diambil oleh aparat akan selalu menjadi sorotan publik. Tentu kita tidak ingin masyarakat melihat Polri seolah berat sebelah. Jika dulu saya khawatir jika aparat tidak bertindak sebagaimana mestinya, nanti ada yang mengambil langkah sendiri. Mereka bisa melakukan tindakan *eigen rechting* atau perbuatan main hakim sendiri. Tentunya ini tidak boleh terjadi,” tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Oleh karena itu, Ketua MKD tersebut meminta polisi segera melakukan tindakan. Terlebih lagi banyak rekaman yang sudah beredar. Sehingga cukup mudah mengidentifikasi siapa saja yang terlibat, dan siapa saja yang harus bertanggung jawab. ■ ayu/es

Anggota Komisi III DPR RI
Habib Aboe Bakar Alhabsy.
Foto: Andri/MAN



GGPC Bisa Jadi *Role Model* Pengembangan Tanaman Hortikultura



Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema bersama Tim Kunker Komisi IV DPR RI saat berkunjung ke PT. GGPC Lampung. Foto: Andri/MAN

Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menilai perusahaan hortikultura PT. Great Giant Pineapple Company (GGPC), Lampung, bisa menjadi proyek percontohan atau *role model* bagi Kementerian Pertanian untuk pengembangan tanaman hortikultura, salah satunya komoditas nanas. Bahkan menurutnya, bila perlu para petani didatangkan ke GGPC untuk mencontoh dan mempelajari teknik pengembangan tanaman hortikultura.

“(GGPC) ini sangat bagus sekali. Saat pertemuan, Ketua Komisi IV juga bilang sama teman-teman di Komisi IV, untuk minta perwakilan GGPC datang ke Komisi IV. Beri kami masukan yang

terbaik, baik itu Peraturan Menteri, Undang-Undang, maupun regulasi. Karena kita hanya ngomong tapi mereka pelaku. Jadi jika yang ngomong dan pelaku jadi satu kan menjadi lebih baik lagi,” katanya usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan Direksi PT. GGPC di Lampung, Selasa (21/7).

Ansy Lema, sapaan akrab Yohanis Fransiskus Lema itu juga juga mengapresiasi langkah GGPC yang menjadikan masyarakat petani sebagai mitra. “Mereka bermitra dengan masyarakat petani di sekitar kawasan, seperti tanam pisang dan segala macam. Itu saya senang sekali dengarnya,” ujar politisi PDI-Perjuangan ini. Dalam kesempatan ini, Tim Kunker

Komisi IV DPR RI juga sempat diajak keliling perkebunan nanas milik GGPC, bahkan ke pabrik pembuatan pupuk, dan proses pengolahan dan pengemasan produk-produk GGPC.

“Ini menurut saya sangat luar biasa. Semua dikelola sendiri, mutu dan kualitasnya dijaga dengan baik dan menjadi komoditas ekspor dunia. Untuk itu saya menyarankan Kementerian Pertanian harus belajar dari sini. GGPC ini sangat baik untuk dimintai saran dan masukannya. Sementara hortikultura kita ini kan masih sangat besar potensinya, jadi ini momen yang baik untuk mengembangkan potensi hortikultura di dalam negeri,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) II itu. ■ man/sf

Laba Menurun, Phapros Harus Perbaiki Kinerja

Laba tahun berjalan yang dihasilkan PT. Phapros Semarang, pada tahun 2019 mengalami penurunan cukup signifikan. Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK meminta agar ke depan manajemen BUMN farmasi ini dikelola secara lebih baik dan efisien lagi agar tidak terjadi penurunan laba yang besar.

“Penurunan laba tahun berjalan dari Rp 133,29 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp 102,31 miliar tahun 2019 sehingga terjadi penurunan sekitar Rp 31 miliar. Ini perlu mendapat perhatian serius,” ujar Amin saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Kantor PT. Phapros Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/7).

Legislator dapil Jawa Timur IV ini membandingkan, saat Phapros masih perusahaan swasta justru terbilang bagus kinerjanya, tapi setelah menjadi BUMN justru menurun, kondisi ini tidak bagus untuk masa depan. Dengan menjadi BUMN tentu ada fasilitas dari negara, ada modal dari negara, ada sumber daya dari negara, bahkan ada kebijakan-kebijakan negara yang berpihak.

Ia menguraikan, laba bersihnya sebuah perusahaan merupakan salah satu parameter keberhasilan atau kegagalan manajemen. Penurunan laba bersih mencapai sekitar 30 persen mengundang tanda tanya besar, sebelum menjadi BUMN sempat menorehkan keuntungan Rp 133 miliar lalu pada tahun 2019 justru menurun menjadi Rp 102 miliar.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengkritisi alasan pihak manajemen Phapros bahwa penurunan laba diakibatkan adanya bunga hutang jatuh tempo. Namun menurut Amin, lebih disebabkan oleh manajemen operasional perusahaan yang kurang baik dan ini menjadi tantangan tersendiri. “Jangan sampai BUMN selalu identik dengan perusahaan plat merah yang kalah



Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK saat mengikuti Kunjuran Komisi VI DPR RI ke Jawa Tengah. Foto: Oji/Man

dengan swasta,” tegas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

Ia menerangkan, Komisi VI DPR RI akan mendukung dari sisi kebijakan tapi manajemen Phapros harus bisa menunjukkan kinerja yang lebih bagus. “Kita akui pemain di bisnis farmasi ini sangat banyak, dari pangsa pasar sebesar Rp 88 triliun ada sekitar 250 pemain di bidang farmasi ini. Dan perusahaan terbesar saja menguasai tak lebih dari 6 persen *share market*-nya,” jelas Amin lebih lanjut.

Politisi yang memiliki latar belakang seorang akuntan ini mengatakan bahwa persaingan di bidang farmasi di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) menjadi tantangan tersendiri bagi Phapros dan Kimia Farma selaku induknya. “Industri farmasi ini menjadi salah satu kebutuhan pokok rakyat harus bisa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG (Good Corporate Government). Bila ini ditegaskan maka akan meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik,” pungkask politisi dapil Jawa Timur IV itu.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Phapros, Hadi Kardoko dalam paparannya mengakui adanya penurunan laba tahun berjalan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Hal tersebut menurutnya disebabkan adanya pembayaran hutang jatuh tempo dan juga akuisisi PT. Lucas Djaja.

“Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada tahun 2018 skornya sebesar 479,75 meningkat menjadi 523,25 pada tahun 2019. Sementara peningkatan skor perolehan GCG tahun 2018 sebesar 86,72 menjadi 90,09 (*very good/sangat baik*) pada tahun 2019,” ulas Hadi.

Langkah sinergi ketika masuk dalam Kimia Farma Group antara lain penjualan produk Phapros melalui jaringan Kimia Farma, penetrasi pasar ekspor, ekspansi pasar melalui penetrasi digital, efisiensi dalam pengadaan bahan baku melalui *joint procurement* serta *refinancing* pinjaman kepada pihak ketiga melalui *line* Kimia Farma, terang Hadi. ■ oji/es

Publik Diminta **Tingkatkan** Kewaspadaan Terhadap Covid-19

Anggota Komisi VI DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengingatkan publik untuk semakin waspada terhadap pandemi virus Corona (Covid-19). Jangan sampai masyarakat meremehkan apalagi menganggap virus tersebut tidak ada. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk mendengar dan membaca informasi yang benar. Agar tidak termakan berita bohong atau hoaks, sehingga salah dalam melangkah.

“Covid-19 itu ada. Dengarkan peran para dokter dan tenaga kesehatan. Dukung mereka bekerja dengan baik termasuk dukung mereka agar mendapatkan alat kesehatan, dan kesejahteraan yang sesuai dari negara,” ujar Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro Yudhoyono dalam rilis yang diterima *Parlementaria*, Selasa (4/8).

Selain itu Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini juga berharap vaksin untuk melawan virus Covid-19 segera ditemukan, sehingga pandemi ini akan berakhir. Di samping itu, juga perlu meningkatkan soliditas dan kepedulian terhadap sesama masyarakat. “Dimasa

”

DUKUNG MEREKA BEKERJA DENGAN BAIK TERMASUK DUKUNG MEREKA AGAR MENDAPATKAN ALAT KESEHATAN, DAN KESEJAHTERAAN YANG SESUAI DARI NEGARA

pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, diperlukan kepedulian dan bantuan bidang ekonomi. Jangan sampai masyarakat sulit makan karena kehilangan pekerjaan,” sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, masih ada warga yang tidak percaya terkait virus Corona. Sehingga, mereka tidak menghiraukan bahaya virus tersebut. Seperti survei yang dilakukan di Aceh. Bahwa dilaporkan, 8 dari 10 orang di Aceh tidak percaya adanya virus Corona. Mereka yang percaya hanya 2 orang saja. Di samping itu, jumlah orang yang terinfeksi virus ini juga terus meningkat, hingga Selasa, 4 Agustus 2020 sudah ada 115.056 masyarakat Indonesia yang terinfeksi positif virus Corona. ■ hs/sf

Anggota Komisi VI DPR RI
Edhie Baskoro Yudhoyono.
Foto: Andri/MAN





Anggota Komisi IX DPR RI Sri Wulan saat mengikuti Kunker Komisi IX DPR RI ke Kantor Pusat BP Jamsostek DIY. Foto: Ayu/MAN

Anggota DPR Apresiasi Inovasi Pelayanan BP Jamsostek DIY Saat Pandemi

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Wulan mengapresiasi inovasi atau terobosan baru terkait pelayanan yang dilakukan oleh BP Jamsostek Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama pandemi Covid-19. Dimana, peserta BP Jamsostek bisa berkomunikasi langsung dengan *customer service* langsung tanpa harus bertatap muka.

“Pelayanan oleh BP Jamsostek DIY ini sangat luar biasa. Menurut saya ini terobosan atau inovasi baru. Itu bisa dilihat dengan adanya *boot* yang dilengkapi perangkat komputer, dimana peserta yang datang ke kantor BP

Jamsostek bisa langsung berkomunikasi dengan *customer service* tanpa harus bertatap muka seceara langsung. Ini menjadi salah satu contoh penerapan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 dalam hal pelayanan publik,” ujar Wulan saat Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kantor Pusat BP Jamsostek Di Yogyakarta, Sabtu (18/7).

la melanjutkan, dengan sistem *online* tersebut satu orang *customer service* dari BP Jamsostek bisa melayani delapan orang sekaligus dalam satu waktu. Dengan begitu pelayanan juga berjalan efektif dan efisien. Selain itu dengan audio panduan dalam sistem *online* tersebut

melatih peserta BP Jamsostek untuk melek teknologi.

“Kami juga mencoba menggunakan sistem *online* tersebut, ternyata ada pemandunya juga. Satu *customer service* bisa melayani delapan orang sekaligus. Prosesnya cepat, termasuk proses klaim. Begitu juga jika ada keluhan, langsung dijelaskan saat itu. Dengan demikian, adanya pandemi ini BP Jamsostek bisa membuktikan tetap memberikan pelayanan terbaik. Protokol kesehatan pun tetap dijalankan, namun tanpa mengurangi manfaat layanan dari BP Jamsostek itu sendiri,” papar politisi Partai NasDem ini menutup pernyataannya. ■ ayu/es

Pembangunan RS yang Melayani Peserta BPJS Kelas III Perlu Digalakkan

Pelayanan kesehatan yang sama dan tanpa membedakan klasifikasi kepesertaan, selayaknya didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk itu, Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning memandang perlu digalakkan pembangunan rumah sakit yang khusus melayani kepesertaan BPJS Kesehatan kelas III di semua daerah.

“Afdolnya memang harus begitu, APBN itu harus berpihak kepada rakyat. Alasannya jelas, harus untuk peserta KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang PBI (Penerima Bantuan Iuran). Apalagi kalau sekarang iuran BPJS naik, pasti banyak yang turun kelas. Kelas I dan kelas II pasti banyak yang turun ke kelas III,” ungkap Ribka saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Banten, Jumat (17/8).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Tangsel di bawah kepemimpinan Wali Kota Airin Rachmi Dyani, membangun Rumah Sakit Pakulonon yang diperuntukkan bagi kepesertaan kelas III terutama PBI. Ia kembali menekankan pentingnya bagi semua daerah untuk mengikuti langkah yang telah dimulai oleh Pemkot Tangsel ini.

”

PERLU DIDUKUNG PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT YANG MELAYANI KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN KELAS III DI SEMUA DAERAH, SUPAYA BANYAK RAKYAT YANG BISA TER-COVER DAN TERLAYANI KESEHATANNYA

“Harusnya itu (pembangunan rumah sakit kelas III) berlaku di semua daerah. Kalau saya dulu saat menjadi Ketua Komisi, kalau membantu anggaran (rumah sakit), kita lihat dulu kelas III-nya (dulu askeskin). Kalau di RSUD, kelas III nya harus di atas 60 persen. Kalau RS swasta, memang sudah ada ketentuan, 25 persen harus untuk kelas III. Tapi kalau rumah sakit negara, harus diatas 60 persen kelas III,” tegasnya.

Untuk itu, perlu didukung pembangunan rumah sakit yang melayani kepesertaan BPJS Kesehatan kelas III di semua daerah, supaya banyak rakyat yang bisa ter-cover dan terlayani kesehatannya. “Jangan sampai kita yang memiliki KIS, tetapi ketika di rumah sakit, kelas III penuh. Jadi itu kan jadi percuma KIS-nya, jadi *ga kepa*. Dan itu banyak banget, di mana-mana juga begitu. Jokowi bagi-bagi KIS, tapi KIS-nya tidak berlaku di rumah sakit,” pungkas Ribka. ■ es

Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning. Foto: Erman/MAN



Komisi X akan Panggil Mendikbud Terkait Dana Kuota

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf memastikan pihaknya akan segera memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait pemberitaan tentang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialihkan untuk pembiayaan kuota internet bagi peserta didik dan guru. Pemanggilan Mendikbud itu akan dilakukan usai masa reses Dewan berakhir.

“Jadi teknis buat kuota dan bagaimana pembagiannya dengan pembayaran honorer belum tahu pasti. Lalu apakah (sekolah) swasta juga dapat bantuan kuota tadi, ini perlu dijelaskan juga. Yang jelas dana BOS itu sekitar Rp 54 triliun tahun ini, dan di dalamnya ada komponen honor bagi guru honorer,” kata Dede Yusuf dalam keterangan tertulis yang diterima *Parlementaria*, Selasa (4/8)

Lebih jauh, politisi Partai Demokrat ini menegaskan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengawasi dana BOS sebesar Rp 54 triliun tersebut. “Semua mengawasi, termasuk Disdik. Tapi kadang

”

KITA SEDANG PIKIRKAN. SKEMA SELAIN PER SISWA, BISA DENGAN PER KOMPONEN BIAYA PENDIDIKAN BAGI UNIT PENDIDIKAN, ATAU LAINNYA

pelaksanaan memang suka tidak tepat. Karena pembayaran sering telat berbulan-bulan,” tutur legislator dapil Jawa Barat II itu.

Kendati demikian, Dede Yusuf mengaku akan mencari solusi agar polemik tersebut tidak terjadi. Dan hal itu akan dirumuskan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud Nadiem Makarim usai masa reses. “Kita sedang pikirkan. Skema selain per siswa, bisa dengan per komponen biaya pendidikan bagi unit pendidikan, atau lainnya. Harus duduk panjang terkait ini,” pungkas Dede Yusuf. ■ hs/sf

Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Dede Yusuf. Foto: Jaka/MAN



Ali Zamroni: Kebijakan POP Kemendikbud Bikin Gaduh

Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni menyesalkan kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai telah membuat gaduh dunia pendidikan di masa pandemi Covid-19. Ia menyebutkan, pembiayaan POP dibebankan pada APBN, yakni mencapai Rp 595 miliar.

Ironisnya, ada tiga organisasi besar yang telah menyatakan mengundurkan diri dari POP Penggerak, yaitu NU, Muhammadiyah dan PGRI. “Kita ketahui, betapa ketiga organisasi ini berkontribusi membangun dunia pendidikan di Indonesia sejak lama dan informasi bahwa tidak lolosnya beberapa organisasi yang sudah layak seperti Muslimat NU, Aisyiyah, IGNU dan lain lain,” kata Ali dalam keterangan persnya, Senin (27/7).

Seperti diketahui, PGRI, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak yang diluncurkan Kemendikbud. Mereka menilai, pemilihan ormas dan lembaga pendidikan yang ditetapkan lolos evaluasi proposal bantuan dana POP tidak jelas dan transparan.

Sementara itu, terkait masuknya Sampoerna dan Tanoto Foundation jadi mitra POP Kemendikbud, Ali menduga bahwa program ini sudah masuk dalam kategori konflik kepentingan karena Sampoerna Foundation mendapatkan Kategori Gajah sebesar Rp 20 miliar di Program Organisasi Penggerak. Sedangkan, Dirjen GTK Kemendikbud yang menandatangani SK POP merupakan mantan Dekan di



Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni. Foto: Jaka/MAN

”

ORGANISASI YANG TAK LOLOS, HARUS DIBERITAHU KENAPA TIDAK LOLOS, APA SEBABNYA, KEKURANGANNYA APA

Universitas Sampoerna.

“Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud RI harus di evaluasi karena pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan. Jangan sampai adanya titipan dan ditanggung oleh kepentingan pribadi atau golongan,” kritik politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Kendati demikian, Ali Zamroni memberikan apresiasi atas adanya POP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Untuk itu, ia meminta agar badan independen yang melakukan seleksi kepada organisasi dalam POP tersebut bersikap transparan mengenai proses dan hasil seleksi terhadap organisasi yang lolos dalam POP.

“Kami apresiasi SMERU telah melakukan evaluasi dan sebaiknya hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta untuk perbaikan ke depannya. Organisasi yang tak lolos, harus diberitahu kenapa tidak lolos, apa sebabnya, kekurangannya apa, “ tandas legislator dapil Banten I itu seraya berharap agar POP tetap diteruskan dan alokasi anggarannya dibuat lebih fleksibel sesuai kriteria tertentu. ■ ann/sf

Bank Himbara Harus Cepat Salurkan Dana Pinjaman bagi UMKM

Pemerintah telah menyetujui penempatan uang negara ke bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 30 triliun. Nantinya, penempatan dana tersebut akan difokuskan ke segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengimbau seluruh bank Himbara untuk mempercepat penyaluran dana tersebut kepada sejumlah sektor.

“Bank Mandiri dan Bank BRI harus mempercepat penyaluran dana pinjaman kepada sektor pelaku usaha kecil dan menengah. Ini penting karena mereka tumpuan ekonomi kita yang sebagian besar berasal dari sektor konsumsi. Dana yang berasal dari dana percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), juga harus cepat disalurkan untuk menghindari ekonomi kita dari jurang resesi,” kata Rudi, mengutip pernyataannya saat menghadiri Kunjungan Kerja Reses perorangan di kota Binjai, Langkat, Sumatera Utara, belum lama ini.

Di hadapan konstituen dan pendukungnya yang terdiri dari para pelaku usaha kecil dan menengah, Rudi mengingatkan masyarakat daerah pemilihannya untuk lebih giat lagi dalam menjalankan usaha. Serta, meningkatkan inovasi-inovasi baru dalam berusaha di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

“Jangan hanya pasrah dan

menyerah pada nasib, bank pasti akan membantu memberikan modal dan pinjaman, dan bank-bank harus memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat saat pandemi seperti sekarang ini, itu yang akan terus diusahakan,” papar politisi dapil Sumatera Utara III itu.

Legislator Fraksi Partai Nasdem ini melihat sejauh mana keseriusan bank-bank Himbara, seperti Bank Mandiri dan BRI dalam membantu rakyat memulihkan

perekonomiannya. Berdasarkan data yang dimilikinya, penyaluran pinjaman dana atau kredit produktif yang dilakukan oleh Bank Mandiri per 17 Juli 2020 sudah mencapai Rp 12,05 triliun.

“Ini artinya Bank Mandiri tidak main main, dan terus mendukung program Pemerintah. Tidak hanya itu, kinerja Bank BRI yg menyalurkan kepada pelaku usaha kecil senilai Rp 20,7 triliun, yang berarti dua kali lipat dari dana yg diterima BRI dari Pemerintah. Saya nilai kedua bank Pemerintah ini bersungguh sungguh membantu rakyat memulihkan perekonomiannya di daerah,” tutup Rudi dalam keterangan tertulisnya kepada **Parlementaria**.

■ alw/es



Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun. Foto: Ariel/MAN

Kemandirian adalah Esensi Pembelajaran Jarak Jauh



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso. Foto: Gerald/MAN

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso memaparkan, metode pembelajaran dalam jaringan (daring) memiliki tantangan tersendiri, minimal ada tiga faktor yang dapat menentukan efektifitas metode pembelajaran secara daring. Pertama teknologi, kedua karakteristik pengajar, ketiga karakteristik siswanya sendiri. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat seminar webinar yang bertajuk 'Tantangan dan Kebijakan Dunia pendidikan di Era *New Normal*'.

Dia menjabarkan, pengajar memegang peranan sangat penting dalam efektifitas pembelajaran secara daring. Sementara siswa

yang cerdas dan memiliki disiplin dan kepercayaan diri yang tinggi akan mampu secara efektif melakukan pembelajaran secara daring. Agung menegaskan, esensi pembelajaran jarak jauh adalah kemandirian siswa.

"Catatan penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah sebuah *platfom* pembelajaran secara daring. Idealnya tidak untuk menggantikan peran masing-masing *stakeholder* dalam ekosistem sekolah, yaitu guru, orang tua, dan sekolah itu sendiri," papar Agung dalam sambutannya secara virtual, Selasa (28/7).

Menurut politisi Fraksi Partai Demokrat ini, sejatinya pendidikan lebih dari sekedar perpustakaan

literasi. Pendidikan adalah ekosistem yang tidak hanya akan membuat siswa pintar secara akademis tapi juga berkarakter, dan lebih dari itu siswa butuh interaksi.

Agung pun mengungkapkan, setelah hampir empat bulan wabah Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah terus berupaya mengambil kebijakan di sektor pendidikan, agar proses pembelajaran dapat berjalan, dengan tetap membatasi penyebaran virus Corona. "Masuknya Covid-19 berdampak pada perubahan pola interaksi sosial masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan baru ini pada akhirnya mendorong terbentuknya tatanan normal baru di Indonesia," ungkapnya.

Meskipun wabah melanda, pendidikan tetap menjadi prioritas yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pemerintah selaku penyelenggara negara. Bahkan pengaturan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen untuk menjadi *mandatory spending* dalam APBN. Oleh sebab itu perlu dibangun sistem pendidikan yang kuat, sehingga tercapai tujuan pendidikan nasional sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Agung pun mengingatkan, bahwa pendidikan merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang secara tegas menyatakan tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ■ eko/es

Pembahasan RUU Ciptaker Harus Substantif dan Tidak Retorika



Anggota Badan Legislasi DPR RI Arteria Dahlan. Foto: Oji/AMAN

Anggota Badan Legislasi DPR RI Arteria Dahlan mengingatkan dalam membahas RUU Cipta Kerja (Ciptaker), pemerintah harus mengerjakannya secara cermat, penuh kehati-hatian dan penuh kekhidmatan. Tidak hanya itu, ia juga berharap agar yang dibicarakan adalah hal yang sifatnya substantif. Jadi harus memperhatikan historikal undang-undang *existing*, serta konsisten dengan kebangsaan serta penghargaan kepada kearifan lokal.

Arteria mencontohkan adanya pengalihan kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat, yang disebut sebagai pendelegasian untuk mengatur prosedur dan mekanisme perizinan. Pihaknya sepakat terkait dengan pengaturan perundang-

undangan atau perizinan sektoral. Pihaknya juga sepakat perlu adanya Norma Standar Persyaratan dan Kriteria (NSPK) untuk mengatur bisnis agar prosesnya tidak beririsan dengan kewenangan daerah.

“Tapi ada beberapa yang menggelitik alasan yang tadi disampaikan, ada kewenangan pemerintah pusat didelegasikan ke daerah. Di *Omnibus Law* ini, ternyata pemerintah pusat tidak punya kewenangan tiba-tiba mendelegasikan kewenangan. Mengambil alih, salah-salah dikembalikan lagi ke sana. Ini yang saya katakan cobalah bicara yang substantif. Saya juga minta, janganlah kita retorika,” papar Arteria dalam Rapat Panja RUU Ciptaker di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8).

Arteria mengaku, memang masih ada pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Tapi ada konsekuensi yang tidak mungkin dikerjakan di daerah karena kondisi riil atau pengaturan yang dibuat secara tidak masuk akal, dan logika akal sehat. Sehingga, pada akhirnya melaksanakan kewenangan itu adalah pemerintah pusat.

Ia kembali mencontohkan, isu tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang tidak ditetapkan oleh bupati atau wali kota dalam waktu 1 bulan akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, waktu satu bulan itu bukan waktu yang panjang untuk menetapkan RUTR dan akan menggerus kewenangan daerah. Padahal kita punya konsensus kebangsaan, dimana pemerintah provinsi, kabupaten/kota diberikan kewenangan mengurus sendiri berdasarkan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

“Saya mohon Pemerintah bicaranya substantif dan tidak beretorika. Mau tanya saya sekarang, yang buat *Omnibus Law* ini sudah baca UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum? Jangan-jangan yang buat ini orang swasta. Kenapa? Saya kembali ingin tanya, apa yang kurang di pasal 5, 6, 7, 8 dielaborasi sampai pasal 13 di UU 23 Tahun 2014. Jika tadi Pak Sekjen KLHK menyampaikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan, daya saing, efisiensi efektivitas. Bapak baca *considered* UU 23 Tahun 2014? Ada semua itu. Jangan kita retorika macam-macam panjang lebar. Ini sudah ada Pak di UU 23 Tahun 2014,” pungkas politisi PDI-Perjuangan itu. ■ ayu/es

Kewenangan RTR Tetap di Daerah

Pembicaraan peta tata ruang ruang nasional masih terus dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Pembahasan ini bagian dari klaster isu tata ruang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Hal penting dalam menyusun peta rencana tata ruang (RTR) nasional adalah keterlibatan pemerintah daerah yang sangat menentukan peta tersebut.

Anggota Baleg DPR RI Sodik Mudjahid memaparkan hal ini dalam rapat Baleg bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kamis (23/7). Sodik yang hadir secara virtual itu menegaskan, penyusunan rencana tata ruang,

”

SAYA KIRA INI MASALAHNYA. BUKAN ANTARA DAERAH DAN PUSAT. TAPI SIAPA DI PUSAT YANG MEMBERIKAN KEWENANGAN MENGAMBIL KEPUTUSAN SUBSTANTIF

Anggota Baleg DPR RI
Sodik Mudjahid.
Foto: Andri/MAN



kewenangannya tetap ada di daerah-daerah. Sementara, pemerintah pusat tetap punya kewenangan antara lain untuk koordinasi tata ruang tingkat nasional.

“Pemerintah pusat juga harus menjamin keterpaduan tata ruang nasional ini tanpa mengurangi kewenangan daerah. Sampai di sini persoalan *clear*,” katanya. Perdebatan yang mengemuka dalam rapat Baleg kali ini adalah siapa sebetulnya yang berwenang menyusun peta tata ruang nasional ini. Disampaikan Sodik, Fraksi Gerindra sendiri mengusulkan agar pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya pada pihak lain.

“Ada usulan dari Fraksi Gerindra, apakah keputusan substansi itu cukup oleh menteri saja seperti UU yang ada sekarang atau usulan kami, menteri diwakili panel ahli untuk menjamin objektivitas. Saya kira ini masalahnya. Bukan antara daerah dan pusat. Tapi siapa di pusat yang memberikan kewenangan mengambil keputusan substantif,” urai legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat I ini.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan, nomenklatur untuk urusan ini sebenarnya sudah jelas, yaitu pemerintah pusat. Soal pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya kepada pihak lain, itu menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam rapat Baleg itu, sempat mengemuka agar pemerintah pusat memberi kewenangan kepada tim ahli untuk membahas sekaligus mengambil keputusan soal peta tata ruang nasional. ■ mh/sf

BKSAP–AIPA Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan di ASEAN

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali

Sera mengikuti *meeting virtual* yang diselenggarakan oleh ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) *meeting on Educational and Cultural Cooperation (ECC)*. Mardani menyatakan, BKSAP bersama negara ASEAN lainnya dalam pertemuan tersebut saling berbagi pandangan untuk memberikan perhatian secara khusus terhadap peningkatan kualitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

Sehingga, *end result* memihak kepada para siswa dan siswi di ASEAN secara keseluruhan untuk membangun ‘ASEAN as *Single Community*’ yang maju. Hal itu disampaikan Mardani di sela-sela pertemuan BKSAP DPR RI dengan AIPA-ECC yang bertajuk “*Parliamentary Partnership on Educational and Cultural Cooperation for Sustainable Development*” secara virtual, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7).

“Fokus yang pertama tentang bagaimana menjaga serta meningkatkan kualitas pendidikan di era Covid-19. Tadi Filipina bagus, dimana perusahaan telekomunikasi mereka diminta untuk meningkatkan CSR-nya, sehingga bisa memberikan kuota internet gratis. Kemudian, tadi Vietnam mendesain kurikulum yang lebih *simple*. Jadi, bagi BKSAP DPR RI, pertemuan sore ini membuat kita mendapat *best practice*,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani mengungkapkan, BKSAP DPR RI dalam pertemuan itu memberikan pandangan tentang penambahan *budgeting* di sektor pendidikan seperti yang telah diterapkan di Indonesia. Selain itu, lanjut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera saat pertemuan BKSAP DPR RI dengan AIPA-ECC bertajuk “Parliamentary Partnership on Educational and Cultural Cooperation for Sustainable Development”. Foto: Gerald/IAN

”

FOKUS YANG PERTAMA TENTANG BAGAIMANA MENJAGA SERTA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI ERA COVID-19

(F-PKS) ini, juga pemberian kebebasan kepada *local territory* terkait kebijakan buka tutup sekolah hingga wacana penghapusan Ujian Nasional.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Mardani mengajukan pandangan mengenai pentingnya kolaborasi antar negara ASEAN terutama yang bertanggung dalam penyediaan

infrastruktur internet. Mardani menyampaikan, gagasan itu selaras dengan AIPA *quotes* tentang ‘*Seamless Connectivity*’ untuk suplai penyediaan fasilitas internet khususnya di daerah terluar, terpinggir, dan tertinggal (3T) di masing-masing negara.

“Inilah pentingnya AIPA *quotes* tentang ‘*Seamless Connectivity*’ Contohnya, beberapa daerah 3T di Indonesia ada yang lebih dekat ke Filipina atau Malaysia. Maka, kita usulkan untuk suplai internet ke daerah 3T itu bersumber dari kedua negara itu. Sebaliknya, warga Filipina yang dekat Sulut mendapatkan fasilitas dari Indonesia. Kita ajukan, demi membangun ‘ASEAN as *Single Community*’ yang maju,” pungkas Anggota Komisi II DPR RI itu. ■ pun/sf

Dyah Roro Bicara Tiga Faktor Fundamental dalam Demokrasi Lingkungan

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan Demokrasi Lingkungan didasarkan pada gagasan bahwa pembuatan keputusan yang terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam harus didasarkan atas kepentingan rakyat secara adil. Terdapat tiga faktor fundamental dalam demokrasi lingkungan, yaitu akses terhadap informasi, partisipasi masyarakat, dan akses terhadap keadilan.

“Implementasi demokrasi lingkungan di Indonesia, dimana dasar hukum demokrasi lingkungan di Indonesia tercantum dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),” ujar Roro, mewakili Parlemen Indonesia dalam diskusi virtual *Launch of the Westminster Foundation for Democracy (WFD) Environmental Democracy Initiative*, Selasa (27/7).

The Environmental Democracy Index (EDI) atau Indeks Demokrasi Lingkungan, lanjutnya, ditentukan oleh 75 indikator hukum, dan menggambarkan tingkat kemajuan suatu negara dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi serta penerapan untuk transparansi, akses terhadap keadilan (*justice*) dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan lingkungan hidup. Dalam hal ini Indonesia berada pada peringkat ke-16 dunia dari 70 negara yang dievaluasi dalam indeks ini, dan Indonesia menduduki tertinggi untuk di kawasan regional Asia dan Pasifik.

Tidak hanya itu, politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai bahwa sejatinya

penerapan Demokrasi Lingkungan di Indonesia sudah diterapkan pada beberapa daerah di Indonesia. Misalnya dengan implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub) No 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

Regulasi tersebut muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran akan bahaya penggunaan plastik terhadap lingkungan dan meningkatnya kampanye dan gerakan bebas plastik yang diinisiasi oleh para komunitas, CSO serta partisipasi masyarakat dalam kampanye ini. Gerakan bebas plastik ini juga telah dilakukan di daerah-daerah lain di Indonesia, seperti di Bogor, Banjarmasin, dan Bali. Oleh karena itu, peran masyarakat merupakan hal yang sangat signifikan dalam implementasi Demokrasi Lingkungan.

“Kondisi *new normal* membuktikan

bahwa manusia dapat beradaptasi dengan cepat dalam menjalankan gaya hidup yang berbeda. Ini perlu dijadikan momentum mulai dari sekarang bahkan paska Covid-19, dan diinterpretasikan sebagai pergeseran paradigma untuk mengubah kebiasaan hidup kita yang sifatnya lebih ramah lingkungan tentu dengan tujuan untuk merealisasikan pembangunan keberlanjutan,” kata politisi dapil Jawa Timur ini.

Dalam forum virtual tersebut, Roro menjelaskan bahwa sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam melawan perubahan iklim, Indonesia memiliki target untuk menurunkan tingkat emisi karbon sebesar 29 persen secara mandiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Untuk mencapai hal ini, juga sebagai salah satu implementasi Demokrasi Lingkungan, DPR RI telah memperjuangkan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sudah masuk dalam prolegnas tahun 2020. ■ *ayu/es*



Anggota BKSAP DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: OJJ/MAN



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai memimpin acara pelepasan PNS yang memasuki masa purna bakti terhitung mulai 1 Agustus 2020. Foto: Azka/MAN

Pensiun Bukan Akhir Pengabdian PNS

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pengabdian dan loyalitas yang telah dilakukan para pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang memasuki masa purna bakti. Indra berpesan kepada pegawai yang memasuki masa pensiun agar menyambut masa purna bakti ini dengan rasa bahagia dan sukacita.

“PNS yang memasuki masa pensiun merupakan capaian tertinggi di lingkungan birokrasi, karena tidak semua orang bisa memasuki masa purna bakti dengan baik. Masa pensiun bukan akhir pengabdian dari seorang PNS, tetapi juga merupakan

anugerah setelah melewati masa pengabdian puluhan tahun. Semoga pengabdian dan loyalitas yang telah diberikan kepada negara menjadi ladang amal kebaikan,” ucap Indra saat memimpin acara pelepasan PNS yang memasuki masa purna bakti terhitung mulai 1 Agustus 2020, di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7).

Indra juga berharap agar pegawai Setjen DPR RI yang telah memasuki masa pensiun untuk bisa aktif bergabung dalam Persatuan Pensiunan Pegawai Setjen (P3S) DPR RI. “P3S merupakan wadah bagi para pegawai yang pensiun untuk terus bisa berkarya dan menjadi suatu forum untuk menjaga silaturahmi antar sesama

pensiunan dan juga dengan pegawai Setjen DPR RI,” ujarnya.

Adapun pegawai di lingkungan Setjen DPR RI yang memasuki masa purna bakti terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 adalah Nurani Bodroini (Perisalah Legislatif Ahli Madya), Margana (Pemelihara Peralatan), Mindarti (Penyusun Kesekretariatan Fraksi), Sumedi (Analisis Keamanan), dan Dewi Karyati (Pranata Acara).

Turut hadir dalam acara pelepasan pegawai tersebut antara lain, Deputi Persidangan Setjen DPR RI Damayanti, Plt. Deputi Administrasi Nunu Nugraha, Inspektur Utama Setyanta Nugraha, para Pejabat Eselon II, III, dan IV Setjen DPR RI, Ketua KORPRI DPR RI, Ketua P3S, Dharma Wanita, serta perwakilan PT. Taspen yang menyampaikan sambutan secara virtual.

Acara pelepasan pegawai Setjen DPR RI tersebut tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dan diakhiri dengan pemberian cenderamata dan hak-hak pensiunan, serta foto bersama. ■ dep/es

Kurban di Masa Pandemi, Setjen DPR Terapkan Protokol Kesehatan

Suasana Idul Adha di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) tak mengurangi semangat pengurus Masjid Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI dalam menuntaskan kurban di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8). Segala aktivitas pemotongan hewan kurban dilakukan dengan standar protokol kesehatan, demi mencegah penularan Covid-19.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dengan didampingi pejabat Kesetjenan DPR RI usai membuka acara pemotongan hewan kurban

mengungkapkan, protokol kesehatan itu seperti kewajiban pemakaian masker, sarung tangan hingga penerapan *physical distancing* dan prosedur penyesuaian normal baru lainnya dilakukan oleh tim pemotongan kurban hingga pendistribusian daging kurban kepada pihak yang berhak.

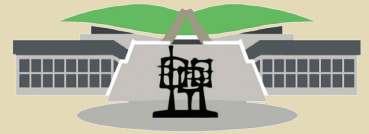
“Yang berbeda tahun ini, kami melaksanakan pemotongan kurban dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,” ungkap Indra. Indra memaparkan, jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini meningkat signifikan. Ada 13

sapi dan 9 kambing dari Pimpinan DPR, DPD, MPR, dan Fraksi-Fraksi.

“Partisipasi kurban meningkat dengan cukup baik,” tutur Indra seraya mengatakan di tengah Covid-19 solidaritas sangat berarti bagi banyak pihak. Disampaikan Indra, usai hewan kurban dipotong, panitia kurban segera mendistribusikan daging kurban kepada petugas *cleaning service*, Pengamanan Dalam (Pamdal), serta *office boy* di lingkungan Kompleks Parlemen, pensiunan pegawai DPR RI serta masyarakat sekitar Kompleks Parlemen. ■ rnm/sf



Sekjen DPR RI Indra Iskandar didampingi pejabat Kesetjenan DPR RI menyerahkan hewan kurban kepada pengurus Masjid Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI. Foto: Arref/MAN



Geladi kotor dalam rangka persiapan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, dan Rapat Paripurna DPR RI pada 14 Agustus 2020 mendatang, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (5/8). Foto: Arief, Oji/Man



Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Ancaman Resesi Ekonomi dan Solusinya" menghadirkan narasumber Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun dan Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam (secara virtual) di Ruang Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (5/8). Foto: Azka/Man



Sekretaris Jendral Indra Iskandar membuka *workshop* Penanganan Kondisi Darurat di Kompleks Gedung DPR RI dengan Tema "Peningkatan Kesiapan dalam Mengenai Kebakaran dan Bencana Alam Secara Cepat dan Tepat", di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8). Foto: Runi/Man

